



Pengaruh Kompetensi SDM Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Dengan Intervening Pencegahan Fraud

Sahmin Noholo

Universitas Negeri Gorontalo, Jl. Jendral Sudirman No. 6 Kota Gorontalo

email: sahminnoholo67@gmail.com

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received 06-08-2021

Revised 16-08-2021

Accepted 16-08-2021

Kata Kunci: *Kompetensi SDM, Pencegahan Fraud, Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah*

Keywords: *Human Resources Competence, Fraud Prevention, Quality of Government Financial Reports*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah dengan pencegahan fraud sebagai variabel intervening. Populasi penelitian ini adalah seluruh pegawai yang berasal dari OPD penghasil PAD pada Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota di Provinsi Gorontalo dengan jumlah sampel sebesar 228 responden. Pendekatan dalam penelitian ini yakni kuantitatif dengan metode *expost facto*. Data dalam penelitian ini yakni data primer melalui angket. Analisis data yang digunakan yakni analisis deskriptif dan analisis inferensial (SEM PLS). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Pencegahan Fraud. (2) Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah. (3) Pencegahan Fraud berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah. (4) Kompetensi Sumber Daya Manusia melalui Pencegahan Fraud berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah.

ABSTRACT

*This study aims to determine the effect of human resource competence on the quality of government financial reports with fraud prevention as an intervening variable. The population of this research is all employees who come from PAD-producing OPD in the Provincial, Regency and City Governments in Gorontalo Province with a total sample of 228 respondents. The approach in this study is quantitative with the *expost facto* method. The data in this study are primary data through a questionnaire. The data analysis used is descriptive analysis and inferential analysis (SEM PLS). The results of this study indicate that (1) Human Resource Competence has a positive and insignificant effect on Fraud Prevention. (2) Human Resource Competence has a positive and significant impact on the Quality of Government Financial Reports. (3) Fraud Prevention has a positive and significant effect on the Quality of Government Financial Reports. (4) Competence of Human Resources through Fraud Prevention has a positive and insignificant effect on the Quality of Government Financial Reports.*

PENDAHULUAN

Laporan keuangan bagi pemerintah menjadi suatu gambaran bahwa pemerintah dapat melakukan suatu kegiatan kepemerintahan yang baik (*good governance*) terlebih lagi jika laporan keuangan tersebut memiliki kualitas yang sesuai dengan ketetapan standar kualitatif laporan keuangan. Namun demikian, pemerintah seringkali mengabaikan masalah kecurangan yang terjadi dan terkesan terlena dengan adanya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Kabupaten/Kota bahkan pada pemerintah Provinsi. Permasalahan kecurangan dapat terjadi di instansi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, termasuk Pemerintah Provinsi Gorontalo. (media cerdas bangsa.com, Mei 2018).

Penelitian ini difokuskan pada instansi penghasil pendapatan asli daerah (PAD) di Provinsi Gorontalo dan Kabupaten/Kota. Instansi tersebut yakni Dinas Pariwisata, Dinas Kesehatan, Dinas Koperindag, Dinas Perhubungan, Dinas pekerjaan umum, Badan Keuangan, Badan Lingkungan Hidup, DPM-PTSP dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD). Hal ini didasarkan pada pengamatan lapangan bahwa instansi instansi tersebut, pegawainya cenderung melakukan tindakan yang mampu mengurangi pendapatan asli daerah seperti sebagian pendapatan asli daerah tidak disetorkan atau adanya penyimpangan lainnya di lapangan yang dilakukan oleh pegawai dari instansi penghasil pendapatan asli daerah tersebut.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas, antara lain; kompetensi sumber daya manusia dan komitmen dalam pencegahan *fraud*. Hal ini didukung oleh berbagai penelitian yang pernah dilakukan diantaranya penelitian Riandani, R. (2017). yang membuktikan bahwa kompetensi SDM memiliki pengaruh yang positif terhadap kualitas laporan keuangan. SDM yang dapat dikatakan baik sebagai penyelenggara aparatur negara ditandai dari sikap dan perilakunya yang penuh dengan kesetiaan dan ketaatan kepada negara, bermoral dan bermental baik, profesional, sadar akan tanggung jawabnya sebagai pelayan publik dan mampu beradaptasi terhadap perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peranan sumber daya manusia merupakan salah satu masalah besar bagi perusahaan untuk menemukan SDM yang profesional dan terampil dalam waktu yang instan, baik dari segi teknologi, terlebih lagi dari segi manajerial. Jika permasalahan-permasalahan SDM tersebut tidak diperbaiki, maka hal ini akan berdampak negatif terhadap produktivitas, efisiensi dan daya saing perusahaan. Oleh sebab itu, salah satu tujuan dan strategi perusahaan adalah mengembangkan kemampuan teknologi, manajerial, dan profesionalisme dari sumber daya manusia, serta peningkatan produktivitas dengan meningkatkan value-added contents dari produk dan atau jasa lebih cepat dari pesaing-pesaingnya. Iswanto, Y. (2014). Kompetensi sumber daya manusia penting dalam mengelola dan menyajikan informasi keuangan sehingga laporan keuangan yang disusun dapat tepat waktu, oleh karena itu diharapkan untuk

dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan maka dibutuhkan bukan hanya jumlah sumber daya manusia melainkan kompetensi yang dimiliki SDM tersebut. Kompetensi SDM yang ada di Provinsi Gorontalo sudah sangatlah baik karena keaktifan dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dalam melakukan pemetaan jabatan dan penempatan yang sesuai bagi para pegawai. Namun terkait dengan hal ini, penempatan pegawai masih kurang memperhatikan kompetensinya, hal ini terlihat dari 7 pemerintahan yang ada di Provinsi Gorontalo hanya terdapat 2 pemerintahan yakni Provinsi Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo yang melakukan ujian CAT bagi pegawai untuk melakukan penempatan berdasarkan kompetensi mereka khususnya dalam pengelolaan keuangan.

Sementara itu, pencegahan fraud merupakan tindakan yang dilakukan untuk memperkecil kemungkinan terjadinya kecurangan, membatasi atau memperkecil kerugian yang mungkin timbul bila terjadi kecurangan Aggraeni, I.R. (2010). Kecurangan merupakan suatu perilaku dimana seseorang mengambil atau secara sengaja mengambil manfaat secara tidak jujur atas orang lain. Kejahatan merupakan suatu tindakan yang disengaja yang melanggar undang-undang kriminal yang secara hukum tidak boleh dilakukan dimana sebuah negara mengikuti hukum tersebut dan memberikan hukuman atas pelanggaran yang dilakukan. Perbedaan ini penting, karena tidak semua kecurangan adalah kejahatan dan sebagian besar kejahatan bukan kecurangan. Organisasi menderita kerugian akibat kecurangan, tetapi polisi dan badan penegak hukum lainnya bisa mengambil tindakan hanya terhadap kejahatan. Sehingga harus dicegah oleh unsur-unsur penting dalam pemerintahan.

Berbagai penelitian melandasi peneliti dalam mengangkat judul ini dimana alasan mendasarnya yakni karena adanya *Gape Research* yang terjadi dari beberapa penelitian sebelumnya. Penelitian Wonar, et.,al (2018) menemukan bahwa kompetensi sumber daya manusia memberikan dampak yang baik dalam peningkatan efektivitas pencegahan *fraud*, namun berbeda halnya dengan penelitian dari Tantriana (2012) yang menemukan bahwa kompetensi sumber daya manusia bukanlah menjadi faktor penting dalam pencegahan *Fraud*. Kemudian penelitian dari Muda, et.,al (2017) yang menemukan bahwa kompetensi dari sumber daya manusia berdampak signifikan dalam penentuan kualitas laporan keuangan, dimana hal ini berbeda dengan temuan dari Suliyantini & Kusmuriyanto (2017) kompetensi sumber daya manusia berpengaruh tidak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Berdasarkan permasalahan dan berbagai teori, maka tujuan dalam penelitian ini yakni Untuk mengetahui dan menganalisis (1) pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap pencegahan *fraud*, (2) pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan, (3) pengaruh pencegahan *fraud* terhadap kualitas laporan keuangan, (4) pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan melalui pencegahan *fraud*.

KAJIAN PUSTAKA

Teori Keagenan (*Agency Teori*)

Teori keagenan akan terjadi pada berbagai organisasi termasuk dalam organisasi pemerintahan dan berfokus pada persoalan ketimpangan/asimetri informasi

antara pengelola (agen/pemerintah) dan publik (diwakili prinsipal/ dewan). Prinsipal harus memonitor kerja agen, agar tujuan organisasi dapat dicapai dengan efisien serta tercapainya akuntabilitas publik (Sudiarianti, 2015).

Kompetensi Sumber Daya Manusia

Hariandja, M. T. E (2002) mendefinisikan sumber daya manusia adalah salah satu faktor yang paling utama pada suatu instansi dilihat dari faktor-faktor lainnya selain modal usaha. Oleh karenanya, sumber daya manusia sangat diperlukan untuk dikelola dengan baik agar efektivitas dan efisiensi instansi semakin meningkat.

Kualitas Laporan Keuangan

Kualitas laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang kemudian diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki yaitu: Relevan, Andal, Dapat dibandingkan, Dapat dipahami.

Pencegahan *Fraud* (kecurangan)

Istilah *fraud* belum dikenal luas di Indonesia. Masyarakat Indonesia lebih akrab dengan istilah korupsi untuk merujuk segala bentuk penyelewengan atau penyalahgunaan kekuasaan dalam rangka memperkaya diri atau kelompok pelaku. Kedua istilah ini (*fraud* dan korupsi) sama-sama merujuk dalam kejahatan (pidana) terencana yang merugikan Negara, organisasi, organisasi, orang lain. Namun perlu dicatat disini bahwa *fraud* memiliki cakupan yang lebih luas dari korupsi, bahkan korupsi dalam arti tertentu dapat juga dikategorikan sebagai salah satu bagian dari *fraud*. Purba, B. P. (2015).

METODE PENELITIAN

Pendekatan dalam penelitian ini yakni kuantitatif dengan metode *ex post facto*. Data dalam penelitian ini yakni data primer melalui angket. Populasi penelitian ini adalah seluruh pegawai yang berasal dari OPD penghasil PAD pada Pemerintah Provinsi Gorontalo dan Kabupaten/Kota Se-Provinsi Gorontalo. Jumlah populasi sebanyak 5009 pegawai, kemudian dengan metode *Purposive Sampling* diperoleh sampel sebanyak 228 orang pegawai. Analisis data yang digunakan yakni analisis deskriptif dan analisis inferensial (SEM PLS).

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

a. Hasil Analisis

Berdasarkan olah data yang telah dilakukan, hasilnya dapat digunakan untuk menjawab hipotesis pada penelitian ini. Untuk hasil lebih jelasnya ditampilkan dalam tabel berikut ini:

Tabel 1. Hasil Pengujian Hipotesis

Jenis Pengaruh	Pengaruh	t Statistic	P-Value
Langsung	X->Z	0.889	0.374 ^{ns}
	X->Y	2.467	0.014**
	Z->Y	5.324	0.000***
Tidak Langsung	X->Z->Y	0.867	0.386 ^{ns}

^{ns} not significant
* Significant at the 0.1 level (2-tailed).
** Significant at the 0.05 level (2-tailed).
*** Significant at the 0.01 level (2-tailed).

Sumber: Olahan PLS, 2021

Berdasarkan tabel di atas maka dapat diinterpretasikan hasil pengujian hipotesis yang diinterpretasi dengan mengklasifikasikan pengaruh dari variabel:

1. Pengaruh Langsung

a. Pengaruh Kompetensi sumber daya manusia terhadap Pencegahan *Fraud*

Nilai t-statistic pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap pencegahan *Fraud* diperoleh hasil sebesar 0,889 dengan nilai probability value (P-value) 0,374. Jika dibandingkan maka nilai t_{hitung} sebesar 0,889 lebih kecil dibandingkan dengan nilai t_{tabel} sebesar 1,971 ($0,889 < 1,971$). Nilai P-value tersebut lebih besar dari nilai probabilitas 0,05 ($0,374 > 0,05$), maka kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap Pencegahan *Fraud* pada Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Gorontalo dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo. Hasil yang tidak signifikan bermakna bahwa adanya pengaruh yang kurang kuat dari kompetensi sumber daya manusia terhadap pencegahan *Fraud* pada Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Gorontalo dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo sehingga perlu adanya pengembangan kapasitas pegawai dari aspek kompetensi yang diseimbangkan dengan komitmen yang baik.

b. Pengaruh Kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah

Nilai t-statistic pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap pencegahan *Fraud* diperoleh hasil sebesar 2,467 dengan nilai probability value (P-value) 0,004. Jika dibandingkan maka nilai t_{hitung} sebesar 2,467 lebih besar dibandingkan dengan nilai t_{tabel} sebesar 1,971 ($2,467 > 1,971$). Nilai P-value tersebut lebih kecil dari nilai probabilitas 0,05 ($0,004 < 0,05$), maka kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah pada Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Gorontalo dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo. Pengaruh signifikan menunjukkan bahwa sumber daya manusia atau pegawai yang memiliki kompetensi yang baik mampu secara nyata dalam menciptakan laporan keuangan pada Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Gorontalo dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo yang berkualitas.

c. Pengaruh Pencegahan *Fraud* terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah

Nilai t-statistic pengaruh pencegahan *Fraud* terhadap pencegahan *Fraud* diperoleh hasil sebesar 5,324 dengan nilai probability value (P-value) 0,000. Jika dibandingkan maka nilai t_{hitung} sebesar 5,324 lebih besar dibandingkan dengan nilai t_{tabel} sebesar 1,971 ($5,324 > 1,971$). Nilai P-value tersebut lebih kecil dari nilai probabilitas 0,05 ($0,000 < 0,05$), maka pencegahan *Fraud* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah pada Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Gorontalo dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo. Hasil yang signifikan menunjukkan bahwa tindakan mereduksi *Fraud* oleh pada Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Gorontalo dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo akan membuat laporan keuangan makin baik.

2. Pengaruh Tidak Langsung (Pengaruh Kompetensi sumber daya manusia melalui Pencegahan *Fraud* terhadap Kualitas laporan keuangan pemerintah)

Nilai t-statistic pengaruh pengaruh tidak langsung variabel kompetensi sumber daya manusia sebesar 0,867 dengan nilai probability value (P-value) 0,386. Jika dibandingkan maka nilai t_{hitung} sebesar 0,867 lebih kecil dibandingkan dengan nilai t_{tabel} sebesar 1,971 ($0,867 < 1,971$). Nilai P-value tersebut lebih besar dari nilai probabilitas 0,05 ($0,386 > 0,05$), maka H_a ditolak yang berarti bahwa kompetensi sumber daya manusia melalui pencegahan *Fraud* berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah pada Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Gorontalo dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo. Hal ini menunjukkan bahwa pencegahan *Fraud* belum mampu menjadi intervening dari kompetensi SDM terhadap laporan keuangan yang berkualitas pada Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Gorontalo dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo.

b. Pembahasan

Pengaruh Kompetensi sumber daya manusia Terhadap Pencegahan *Fraud*

Hasil pengujian hipotesis ditemukan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap Pencegahan *Fraud* pada Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Gorontalo dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo dengan koefisien jalur sebesar 5,70%. Pengaruh positif menunjukkan bahwa semakin kompeten sumber daya manusia dalam pemerintahan maka akan membuat pegawai tersebut mampu untuk mereduksi berbagai tindakan kecurangan pada Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Gorontalo dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo. Sementara hasil yang tidak signifikan karena pegawai dengan kompetensi yang tinggi seringkali tidak dibarengi dengan komitmen organisasional, kecerdasan emosional yang baik serta terkadang tidak mampu membendung konflik kepentingan dari pimpinan dari Organisasi Perangkat Daerah.

Hal ini sebagaimana pernyataan dari kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Kepala Badan Keuangan Provinsi Gorontalo bahwa selama ini pengembangan sumber daya manusia hanya terpaku pada pengembangan pengetahuan dan keterampilan dan kurang memperhatikan komitman pegawai dan integritas pegawai dalam menjalankan

tugas dan tanggungjawabnya. Komitmen dan integritas merupakan kepatuhan tanpa kompromi untuk kode nilai-nilai moral, dan menghindari penipuan, kemanfaatan, kepalsuan, atau kedangkalan apapun. Pentingnya integritas berasal dari ide bahwa profesi adalah "panggilan" dan membutuhkan profesional untuk fokus pada gagasan bahwa mereka melakukan pelayanan publik. Integritas mempertahankan standar prestasi yang tinggi dan melakukan kompetensi yang berarti memiliki kecerdasan, pendidikan, dan pelatihan untuk dapat nilai tambah melalui kinerja. Hal ini dikuatkan oleh pernyataan dari Sutrisno (2015) bahwa seorang pegawai pemerintah yang kompeten harus mempunyai pengetahuan, keterampilan, dan sikap (komitmen) yang sesuai dengan bidang tugasnya. Dalam hal ini aparatur daerah harus memiliki pengetahuan, kualitas, dan pemahaman yang memadai tentang keuangan daerah, kemudian komitmen dan integritas merupakan faktor lain yang krusial dampaknya bagi peningkatan efektivitas pengelolaan keuangan pada suatu daerah.

Hasil ini sejalan dan sepandapat dengan pernyataan yang diungkapkan oleh Hevesi bahwa pengendalian akuntansi juga akan sangat membantu mempercepat penyajian laporan keuangan pemerintah sehingga laporan keuangan tersebut menjadi tepat waktu. Kompetensi merupakan suatu karakteristik dari seseorang yang memiliki keterampilan (*skill*), pengetahuan (*knowledge*), dan kemampuan (*ability*) untuk melaksanakan suatu pekerjaan. Setiap pekerjaan akan menjadi lebih mudah ketika pegawai yang ada memiliki kemampuan yang baik. Prediksi siapa yang berkinerja baik dan kurang baik dapat diukur dari kriteria atau standar yang digunakan. Ketidaksesuaian dalam kompetensikompetensi inilah yang membedakan seorang pelaku unggul dari pelaku yang berprestasi terbatas (Hevesi, 2005)

Hasil ini sejalan dengan pernyataan dari Tantriana (2012) dimana hasil penelitian tantriana mengemukakan bahwa kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan yang disebabkan masih rendahnya kualitas dari sumber daya manusia dari segi sikap dan komitmen dalam menjalankan pekerjaan sehingga hal ini akan berujung pada terjadinya *Fraud* dalam tata kelola pemerintahan yang kurang sesuai dengan tandar yang ditetapkan. Hal ini berbeda dengan temuan dari Wonar, et.,al (2018) menemukan bahwa kompetensi sumber daya manusia memberikan dampak yang baik dalam peningkatan efektivitas pencegahan *fraud*. Kompetensi pada dasarnya mampu untuk memberikan kontribusi bagi pemerintah dalam meningkatkan visi dan misi pemerintah dalam tata kelola administrasi, pelayanan dan pengelolaan keuangan sehingga makin tingginya perhatian pemerintah atas masalah ini akan berujung pada peningkatan progres dalam pencegahan fraud.

Pengaruh Kompetensi sumber daya manusia Terhadap Kualitas laporan keuangan Pemerintah

Hasil pengujian hipotesis ditemukan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah pada Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Gorontalo dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo dengan koefisien jalur sebesar 11,30%. Pengaruh positif menunjukan bahwa semakin tinggi kompetensi dari sumber daya manusia maka akan menciptakan pelaporan keuangan yang berkualitas pada

Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Gorontalo dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo

Hasil ini sejalan dengan pernyataan dari Moehlerion (2014) bahwa kompetensi sebagai karakteristik yang mendasari seseorang berkaitan dengan efektivitas kinerja individu dalam pekerjaanya atau karakteristik dasar individu yang memiliki hubungan kausal atau sebab akibat dengan kriteria yang dijadikan acuan, efektif atau berkinerja prima atau superior ditempat kerja atau pada situasi tertentu. Menurut beberapa pakar, kompetensi adalah karakteristik yang mendasari seseorang mencapai kinerja yang tinggi dalam pekerjaannya. Pegawai yang tidak mempunyai pengetahuan cukup akan bekerja tersendat-sendat dan juga mengakibatkan pemborosan bahan, waktu, dan tenaga. Makna kompetensi mengandung bagian kepribadian yang mendalam dan melekat pada seseorang dengan perilaku yang dapat diprediksi pada berbagai keadaan dan tugas pekerjaan untuk menjalankan pekerjaan seperti menghasilkan laporan keuangan yang lebih berkualitas.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Shopian (2016) menyebutkan bahwa sumber daya manusia yang berkualitas adalah sumber daya yang mampu menciptakan bukan saja nilai komparatif, tetapi juga nilai kompetitif generatif-inovatif dengan menggunakan energi tertinggi seperti intelligence, creativity, dan imagination. Selain SDM berkualitas. Muda, et.,al (2017) yang menemukan bahwa kompetensi dari sumber daya manusia berdampak signifikan dalam penentuan kualitas laporan keuangan, dimana hal ini berbeda dengan temuan dari Suliyantini & Kusmuriyanto (2017) kompetensi sumber daya manusia berpengaruh tidak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Pengaruh Pencegahan *Fraud* Terhadap Kualitas laporan keuangan pemerintah

Hasil pengujian hipotesis ditemukan bahwa pencegahan *Fraud* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah pada Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Gorontalo dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo dengan koefisien jalur sebesar 37,40%. Pengaruh positif menunjukkan bahwa semakin efektif tindakan pencegahan *Fraud* dalam proses pengelolaan keuangan maka akan menciptakan laporan keuangan pemerintah yang berkualitas pada Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Gorontalo dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo.

Hasil ini sejalan dengan pernyataan dari Wilopo (2006) perilaku tidak etis manajemen dan kecenderungan kecurangan akuntansi dapat diturunkan dengan meningkatkan keefektifan pengendalian internal, ketatanan aturan akuntansi, moralitas manajemen, serta menghilangkan asimetri informasi. Namun penelitian ini menemukan hal yang bertentangan dengan hipotesis serta teori dan hasil penelitian sebelumnya, bahwa kompensasi yang sesuai yang diberikan perusahaan ternyata tidak menurunkan perilaku tidak etis dan kecenderungan kecurangan akuntansi. Hal ini disebabkan kompensasi yang diberikan perusahaan ternyata tidak sesuai dengan keinginan manajemen perusahaan, serta hasil yang diperoleh dari perilaku tidak etis dan kecurangan akuntansi lebih besar dibanding kompensasi yang diterimanya. Demikian pula saat ini di Indonesia belum ada sistem kompensasi yang menjadi acuan secara nasional bagi perusahaan, dan pemerintah untuk mengatur hak dan kewajiban,

ukuran prestasi dan kegagalan, serta ganjaran dan pinalti dalam mengelola organisasi.

Manik & Kusasi (2019) menjelaskan apabila pada instansi pemerintah daerah kurang maksimal menyusun laporan keuangan, maka sistem informasi akuntansi pemerintahan tidak terlaksana dengan baik, khususnya pada saat pencatatan transaksi penggunaan angaran dan penyusunan laporan keuangan daerah yang akan berdampak pada keterambatan penyampaian laporan keuangan, sehingga hal ini dapat menimbulkan kurang maksimal informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dan akan mengurangi kualitas laporan keuangan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas, antara lain; kompetensi sumber daya manusia, penerapan standar akuntansi pemerintahan, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian internal. Selain meningkatkan kualitas laporan keuangan, juga dapat mencegah agar tidak terjadi kecurangan (*fraud*).

Pengaruh Kompetensi sumber daya manusia Melalui Pencegahan *Fraud* Terhadap Kualitas laporan keuangan pemerintah

Hasil pengujian hipotesis ditemukan bahwa kompetensi sumber daya manusia melalui pencegahan *Fraud* berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah pada Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Gorontalo dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo dengan koefisien jalur sebesar 2,10%. Hasil pengaruh yang positif dan signifikan menunjukkan bahwa pencegahan *Fraud* yang dilakukan atas dasar tingkat kompetensi sumber daya manusia akan memberikan efek baik dalam peningkatan kualitas laporan keuangan pada Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Gorontalo dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo. Sementara hasil yang tidak signifikan menunjukkan bahwa tindakan pencegahan *Fraud* dapat menjadi lebih baik dengan adanya kompetensi SDM yang baik namun juga bisa menjadi kurang baik ketika SDM memiliki kompetensi yang tidak disertai dengan langkah konkret mengimpelementasikan tindakan pencegahan *Fraud* dalam rangka untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

Hasil ini sejalan dengan pernyataan dari Suliyantini dan Kusmuryanto (2017) kompetensi sumber daya manusia berpengaruh tidak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Kompetensi sumber daya manusia dan penerapan SAP berpengaruh positif signifikan terhadap penerapan sistem pengendalian intern sistem pengendalian intern dapat menjadi variabel mediasi untuk pengaruh tidak langsung kompetensi sumber daya manusia dan SAP terhadap kualitas laporan keuangan.

SIMPULAN, KETERBATASAN, SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik beberapa simpulan penelitian sebagai berikut:

1. Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap Pencegahan *Fraud* pada Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Gorontalo dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo. Hasil yang tidak signifikan karena pegawai dengan kompetensi yang tinggi seringkali tidak dibarengi dengan komitmen organisasional, integritas dalam kerja, kecerdasan

emosional yang baik serta terkadang adanya sikap kerja yang tidak mampu membendung konflik kepentingan dari pimpinan dari Organisasi Perangkat Daerah.

2. Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah pada Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Gorontalo dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo. Pengaruh positif menunjukkan bahwa semakin tinggi kompetensi dari sumber daya manusia maka akan menciptakan pelaporan keuangan yang berkualitas.
3. Pencegahan *Fraud* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah pada Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Gorontalo dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo. Pengaruh positif menunjukkan bahwa semakin efektif tindakan pencegahan *Fraud* dalam proses pengelolaan keuangan maka menciptakan laporan keuangan pemerintah yang berkualitas.
4. Kompetensi sumber daya manusia melalui pencegahan *Fraud* berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah pada Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Gorontalo dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo. Hasil yang tidak signifikan menunjukkan bahwa tindakan pencegahan *Fraud* dapat menjadi lebih baik dengan adanya kompetensi SDM yang baik namun juga bisa menjadi kurang baik ketika SDM memiliki kompetensi yang tidak disertai dengan langkah konkret mengimpelemntasikan tindakan pencegahan *Fraud* dalam rangka untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

Adapun implikasi dan keterbatasan penelitian ini dijabarkan sebagai berikut ini:

1. Implikasi teoritis hasil penelitian ini adalah secara teori dapat memperkuat teori yang sudah ada yakni teori kompetensi sumber daya manusia, sistem akuntansi keuangan daerah, sistem pengendalian intern pemerintah, pencegahan *fraud* dan kualitas laporan keuangan pemerintah. Implikasi praktis hasil penelitian ini adalah sebagai informasi bagi pihak Kepala Daerah Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota di Provinsi Gorontalo, dalam hal tata kelola keuangan pemerintah daerah sehingga bisa menghasilkan laporan keuangan yang lebih berkualitas dan terus mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
2. Keterbatasan penelitian ini dilihat dari 2 aspek yakni (1) Penelitian ini hanya difokuskan pada Organisasi Perangkat Daerah penghasil Pendapatan Asli Daerah (PAD). (2) Pada proses penelitian dimana sebagian angket penelitian disebarluaskan melalui *Google Form* dan *Feedbacknya* dari responden atas pernyataan angket (kuesioner) yang kurang maksimal.

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan penelitian, maka saran penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pentingnya pemerintah meningkatkan kompetensi dari pegawai bukan hanya fokus pada pengetahuan dan keterampilan dalam bekerja namun perlu juga untuk meningkatkan komitmen dalam organisasi, peningkatan kecerdasan emosional dan integritas bekerja karena aspek kompetensi tidak nampak untuk menjadi penentu bagi pegawai Pemerintah Provinsi Gorontalo dan Kabupaten/Kota se-Provinsi

- Gorontalo untuk melakukan suatu tindakan yang positif maupun negatif dalam pengelolaan keuangan.
2. Perlunya konsistensi dan peningkatan kapasitas dari sumber daya manusia maupun organisasi sektor publik akan berdampak baik dalam upaya meningkatkan laporan keuangan yang lebih berkualitas dengan jalan pencegahan tindakan penyimpangan melalui *Fraud*.
 3. Sebaiknya kegiatan pencegahan fraud dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo dengan mengacu pada model-model pencegahan yang dilakukan oleh suatu perusahaan dengan mengadopsi konsep-konsep *new public management* (inovasi dalam pemerintahan).
 4. Peningkatan kualitas laporan keuangan perlu untuk dipublikasikan oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo dimana pengguna dan masyarakat sangat membutuhkan laporan keuangan tersebut sehingga harus ada link untuk aksesibilitas keuangan dan laporan keuangan pemerintah karena selama ini hanya Kabupaten Gorontalo yang mempublikasikannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Aggraeni, I.R. (2010). Peran Audit Internal Dalam Pencegahan Kecurangan (*Fraud*). *Jurnal Ekonomika*. FE. Universitas Widyaatama Bandung.
- Hevesi, G. A. (2005). Standards for Internal Control in New York State Government. <http://www.osc.state.ny.us>
- Hariandja, M. T. E (2002). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Grasindo.
- Iswanto, Y. (2014). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Pusat Penerbitan Universitas Terbuka.
- Manik, T. & Kusasi, F. (2019). *Kualitas Laporan Keuangan dan Pencegahan Fraud Di Provinsi Kepri*. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Finansial Indonesia* Volume 3, No.1). P-ISSN : 2598-5035; E-ISSN : 2684-8244.
- Moheriono. (2014). Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi Edisi Revisi. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Muda, I; Deni, E; Azhar, A. & Rina, E. 2017. *The Influence Of Human Resource Competency And The Use of Information Technology on The Quality of local Goverment Financial Report with Regional Accounting System as an Intervening*. *Journal of Theoretical and Applied Information Technology*, Vol.95, No.20.
- Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
- Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Purba, B. P. (2015). *Fraud dan Korupsi (Pencegahan, Pendekatan, Dan Pemberantasannya)*. Jakarta : Lestari Kiranata.

- Riandani, R. (2017). Pengaruh Kompetensi SDM, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Empiris pada Instansi Pemerintah Kab. Lima Puluh Kota). *Jurnal. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.*
- Sudiarianti, N. M. (2015). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia pada Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Standar Akuntansi Pemerintah Serta Implikasinya pada Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Tesis. Program Pascasarjana. Universitas Udayana.*
- Sophian, M. D. (2016). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual (Survey Pada Dinas Pemerintahan Di Kota Bandung). *Jurnal. Program studi akuntansi fakultas ekonomi universitas pasundan bandung.*
- Sulyantini, L & Kusmuriyanto. (2017). *The Effect of Human Resources Competency and Accrual Based Government Accounting Standard Implementation on the Quality of Local Government Financial Statement with the Implementation of Internal Control System as a Mediating Variable. Jurnal. Accounting Analysis Journal*
- Tantriana, S. (2012). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten Dan Kota Semarang). *Jurnal Universitas Diponegoro.*
- Wilopo. (2006). Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi: Studi Pada Perusahaan Publik Dan Badan Usaha Milik Negara Di Indonesia. *Jurnal. SNA IX Padang.*
- Wonar, K. (2018). Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa,Ketaatan Pelaporan Keuangan dan Sistem Pengendalian intern terhadap pencegahan fraud dengan moral sensitivity sebagai variable moderasi. *Jurnal Akuntansi. Audit & Aset Volume 1, Nomor 2, November 2018: 63–89*